



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

IMPLIKASI RE-DESAIN DESENTRALISASI FISKAL INDONESIA PADA KEPUTUSAN ANGGARAN
PROVINSI DI INDONESIA
(Studi Keputusan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022)
Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)
Amzul Zuhdi, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo M.P.P
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diundur dari <http://hdl.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Pertanyaan Penelitian	14
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	14
1.6 Batasan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Desentralisasi Fiskal dan Implikasinya	16
2.1.2 Keputusan Anggaran	34
2.1.3 Konsepsi Kebijakan Re-Desain Desentralisasi Fiskal Indonesia	48
2.2 Kerangka Berpikir Penelitian	65
2.3 Konsep Operasional	66
BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	70
3.2 Lokus Penelitian	71
3.3 Sumber Data Penelitian	73



BAB IV KEBIJAKAN ANGGARAN PROVINSI SUMATERA UTARA PASCA

KEBIJAKAN RE-DESAIN DESENTRALISASI FISKAL 79

BAB V IMPLIKASI RE-DESAIN DESENTRALISASI FISKAL PADA KEPUTUSAN

ANGGARAN PROVINSI SUMATERA UTARA 136

BAB VI PENUTUP 250

DAFTAR PUSTAKA 260

Tabel 2. 1 Proporsi Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Untuk Provinsi Pasca Re-Design

Kebijakan Desentralisasi Fiskal 52

Tabel 2. 2 Jenis Pajak dan Besaran Penerimaan Pajak Dearah Provinsi Pasca Re-Design

Desentralisasi Fiskal 57

Tabel 2. 3 Jenis Retribusi Daerah Pasca Re-Desain Desentralisasi Fiskal 60

Tabel 2. 4 Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Faktor Mempengaruhi Keputusan Anggaran 67

Tabel 2. 5 Defenisi Konsep Operasional Keputusan Anggaran atau Budget Decision (Lee et.al,

2013) 68

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 76

Tabel 4. 1 Tren Capaian dan Sasaran Makro Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2024 83

Tabel 4. 2 Prioritas Pembangunan dan Sektor Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara 85

Tabel 4. 3 Kegiatan Pembanunan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Re-Desain

Desentralisasi Fiskal 87

Tabel 4. 4 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Mendukung Prioritas Pembangunan dan

Sektor Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara 89

Tabel 4. 5 Alokasi Anggaran Daerah Untuk Sektor Perekonomian Pada Prioritas

Pembangunan dan Sektor Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara 90

Tabel 4. 6 Struktur Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Kebijakan

Re-Design Desentralisasi Fiskal 94

Tabel 4. 7 Jenis dan Besaran Tarif Pajak Daerah Provinsi Pasca Kebijakan Re-Desain

Desentralisasi Fiskal 96

Tabel 4. 8 Alokasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara 98

Tabel 4. 9 Alokasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan Re-Design

Desentralisasi Fiskal 101

Tabel 4. 10 Alokasi Pendapatan Transfer Dearah Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan

Re-Desain Desentralisasi Fiskal 107



Tabel 4. 11 Struktur Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan Re-Desain

Desentralisasi Fiskal 113

Tabel 4. 12 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Pada Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera

Utara Pra dan Pasca Kebijakan Re-Desain Desentralisasi Fiskal 117

Tabel 4. 13 Alokasi Belanja Daerah Pada Prioritas Pembangunan dan Sektor Strategis Daerah

Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan Re-Desain Desentralisasi Fiskal 122

Tabel 4. 14 Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Urusan Pemerintahan Oleh

Setiap Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara 127

Tabel 4. 15 Alokasi Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Daerah Provinsi Sumatera

Utara Pasca Kebijakan Re-Design Desentralisasi Fiskal 131

Tabel 4. 16 Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan

Re-Desain Desentralisasi Fiskal 133

Tabel 5. 1 Sasaran Strategis, Tujuan Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi

Sumatera Utara 143

Tabel 5. 2 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Pada Kepentingan Strategis Kepala Daerah

Provinsi Sumatera Utara 144

Tabel 5. 3 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Kepentingan Strategis Kepala Daerah

Pada Sektor Perekonomian Provinsi Sumatera Utara 148

Tabel 5. 4 Alokasi Belanja Daerah Untuk Kepentingan Strategis Kepala Daerah Pada Sektor

Pariwisata dan Agraris Provinsi Sumatera Utara 150

Tabel 5. 5 Surplus/Defisit Dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara 156

Tabel 5. 6 Estimasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Re-Design

Desentralisasi Fiskal 170

Tabel 5. 7 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan Re-Design

Desentralisasi Fiskal 173

Tabel 5. 8 Besaran Estimasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan Re-

Design Desentralisasi Fiskal (Dalam Milyar Rupiah) 180

Tabel 5. 9 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca

Re-Design Desentralisasi Fiskal 181



**IMPLIKASI RE-DESAIN DESENTRALISASI FISKAL INDONESIA PADA KEPUTUSAN ANGGARAN
PROVINSI DI INDONESIA**
**(Studi Keputusan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022)**

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)

Amzul Zuhdi, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo M.P.P

Tabel 5. 10 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan Re-

Design Desentralisasi Fiskal	184
Tabel 5. 11 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Pada Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	187
Tabel 5. 12 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Pada Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	188
Tabel 5. 13 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Utara	193
Tabel 5. 14 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara	197
Tabel 5. 15 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Pada Sektor Strategis Daerah Untuk Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Provinsi Sumatera Utara	203
Tabel 5. 16 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara	210
Tabel 5. 18 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Pada Perangkat Pemerintah Daerah Yang Bertanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Daerah dan Sektor Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara	226
Tabel 5. 19 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Pada Unsur Pemerintahan non-Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Sektor Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara	229
Tabel 5. 20 Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Urusan Pemerintahan Oleh Setiap Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara	233



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

IMPLIKASI RE-DESAIN DESENTRALISASI FISKAL INDONESIA PADA KEPUTUSAN ANGGARAN
PROVINSI DI INDONESIA
(Studi Keputusan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022)
Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)
Amzul Zuhdi, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo M.P.P

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian	65
Gambar 3. 1 Model Interaktif Miles-Huberman	78



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

IMPLIKASI RE-DESAIN DESENTRALISASI FISKAL INDONESIA PADA KEPUTUSAN ANGGARAN
PROVINSI DI INDONESIA

(Studi Keputusan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022)

Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)

Amzul Zuhdi, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo M.P.P.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Alokasi Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Prioritas

Pembangunan dan Sektor Strategis Dearah Pasca Kebijakan Re-Desain	
Desentralisasi Fiskal	91

Grafik 4. 2 Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca

Kebijakan Re-Design Desentralisasi Fiskal	109
---	-----

Grafik 4. 3 Persentase Struktur Alokasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca

Kebijakan Re-Design Desentralisasi Fiskal	115
---	-----

Grafik 4. 4 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Pada Urusan Komponen Urusan

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Kebijakan Re-Desain	
Desentralisasi Fiskal	118

Grafik 4. 5 Persentase Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Urusan

Pemerintahan Oleh Setiap Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara	
(Milyar Rupiah)	128

Grafik 4. 6 Persentase Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Re-

Design Desentralisasi Fiskal	174
------------------------------------	-----